

**IDENTIFIKASI " CORE VALUES " PENDIDIKAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM IPS
DI SMP/MTs**

Oleh :

Drs.Dadang Dahlan, M.Pd.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya terdapat hubungan yang sangat erat bahkan tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan merupakan bagian yang integral dari kebudayaan. Pendidikan pun merupakan cara yang dipakai untuk meneruskan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya, sedangkan kebudayaan merupakan semangat yang menjiwai pendidikan.

Menurut Tilaar (1999:9), krisis yang mendera masyarakat Indonesia dewasa ini, diantaranya disebabkan oleh krisis pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Baru tidak diarahkan untuk manusia-manusia yang berbudaya yang mempunyai identitas atau jati diri. Pendidikan telah dimanipulasi untuk tujuan-tujuan intelektualime yang sempit dan telah mematikan inisiatif serta kemandirian berpikir. Demikian pula selama Orde Baru nilai-nilai moral yang merupakan inti dari kebudayaan dan pendidikan telah direduksi menjadi nilai-nilai indoktrinasi yang tanpa arti.Dengan kata lain pendidikan pada masa Orde Baru, telah tercerabut dari akar-akar budaya yang hidup.

Dengan melihat berbagai kelemahan pada masa Orde Baru, pendidikan pada masa reformasi telah merumuskan visinya yakni “ membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia “ (Tilaar,1999:10).

Karena nilai-nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan, maka perumusan nilai-nilai inti (*core values*) dalam pendidikan merupakan hal sangat strategis. Nilai-nilai ini bukan hanya disampaikan melalui mata pelajaran yang khusus, tetapi juga harus dikandung dalam semua program kurikulum. Di dalam setiap mata pelajaran harus selalu tersirat nilai-nilai, terutama nilai-nilai moral yang merupakan sarana pengatur kehidupan. Masalahnya, nilai-nilai inti (*core values*) apa yang harus dikembangkan dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan IPS? Bagaimana implikasinya terhadap perancangan kurikulum ?

Seperti yang diutarakan oleh Numan Somantri (2000:136), sejak tahun 1960 telah berkali-kali dilakukan pembaharuan pendidikan IPS, baik dalam lingkungan pendidikan dasar maupun menengah. Namun pembaharuan-pembaharuan tersebut dapat dikatakan kurang berhasil. Pembaharuan yang telah dilakukan berada dalam status transmisi (T), tidak bergerak ke arah moderative (M), apalagi ke arah innovation (I).

Setelah memperbandingkan sistem pendidikan di negara Jepang dan Amerika Serikat, Numan Somantri (2000:142), mengidentifikasi 7 isu pendidikan IPS di Indonesia yang diperlukan untuk pembaharuan. Dua isu diantaranya adalah :

- (1) Bagaimana agar kerja keras dan motivasi belajar bisa ditumbuhkan dalam pribadi peserta didik dan guru agar kualitas pendidikan makin meningkat menyongsong abad ke-21 yang akan penuh tantangan ekonomi, sains, teknologi, sosial budaya dalam era globalisasi ?
- (2) Langkah-langkah pengembangan kurikulum dan pembaharuan pendidikan IPS yang bagaimanakah yang dapat menjamin tumbuhnya kerja keras dan motivasi belajar pada peserta didik dan guru yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan ?

Dua isu tersebut sangat strategis dalam era globalisasi yang menuntut SDM yang bermutu untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif, sehingga bisa memenangkan persaingan dengan bangsa lain. Ini hanya bisa dicapai bila bangsa kita memiliki etos kerja keras dan motivasi belajar yang tinggi.

Masalah lainnya yang menurut hemat penulis tidak kurang pentingnya adalah upaya kita untuk melestarikan dan memperkuat identitas kebangsaan, sebab hanyut dalam arus globalisasi akan mengakibatkan lunturnya identitas kebangsaan. Karena itu, dapat dirumuskan isu :

(3)Pembaharuan pendidikan IPS yang bagaimana yang memungkinkan pendidikan IPS bisa berperan dalam menyebarkan nilai-nilai, norma dan kelaziman yang berlaku di masyarakat, sehingga bisa melestarikan dan memperkuat identitas kebangsaan ?

KEBUDAYAAN DALAM PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL

Misi pendidikan nasional tidak terlepas kaitannya dengan visi pembangunan nasional . GBHN telah merumuskan visi pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Visi masyarakat Indonesia baru tersebut dituangkan di dalam misi pendidikan nasional yaitu “ mengembangkan kualitas manusia Indonesia “ yang demokratis, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab dan menguasai iptek.

Menurut Tilaar (2000:208), Manusia yang cerdas bukan hanya semata-mata memiliki kecerdasan intelektual, tetapi berbagai kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosional, kecerdasan etika serta estetika. Dengan kata lain, manusia yang cerdas yang menjadi pilar-pilar dari masyarakat Indonesia baru adalah manusia yang “ terdidik dan berbudaya “ .

Paradigma baru reformasi pendidikan nasional yang berdasarkan kebudayaan perlu dirumuskan kembali visi dan misinya. Dengan indikator “ sistematisasi pendidikan “, Tilaar (2000) mengusulkan paradigma : (1) pengembangan sistem pendidikan nasional yang terbuka bagi keragaman dalam pelaksanaannya, (2) program-program nasional dibatasi hanya pada upaya pengembangan kesatuan bangsa.

Bertitik tolak dari strategi yang pertama, sistem pendidikan harus berorientasi kepada kehidupan nyata di daerah. Daerah memiliki kebutuhan-kebutuhannya sendiri serta didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di daerah tersebut. Karena itu pengembangan kebudayaan daerah merupakan sesuatu yang mutlak, sebab pendidikan tidak terjadi tanpa kebudayaan . Kemudian berdasarkan strategi yang kedua, pendidikan bertugas untuk mengembangkan sikap dari peserta didik sebagai anggota dari kesatuan nasional. Karena itu pula, pendidikan bertugas untuk mengembangkan kebudayaan nasional, sebab tanpa kebudayaan nasional tidak mungkin ditumbuhkan pendidikan nasional. Pendidikan harus memperkuat tumbuhnya suatu perasaan nasional yang lebih sehat dan lebih nyata karena didasarkan kekayaan budaya lokal. Kaitan pendidikan dengan kebudayaan sangat begitu erat. Denis Lawton (1991), seorang ahli kurikulum dari Institute of Education menyatakan “ *education is concern with the transmission of*

culture to the next generation “ and curriculum can be define as essentially a selection from the culture of a society “

.” CORE VALUES “ PENDIDIKAN

Kehidupan sosial budaya berupa struktur kehidupan masyarakat yang di dalamnya terjalin proses hubungan sosial yang dinamik terus berkembang. Pada setiap lingkungan masyarakat terdapat konfigurasi tata nilai yang dimiliki bersama dan terus dikembangkan sepanjang masa.

Koentjaraningrat (1984), membagi kebudayaan menjadi tiga aspek yaitu aspek idiil (sistem nilai), kelakuan manusia yang mempunyai pola tertentu, dan produk fisik dari kebudayaan. Dari ketiga aspek ini, sistem nilai merupakan dasar yang paling penting, sebab memberi arah terhadap aspek kebudayaan yang lainnya. Perubahan suatu nilai akan mempengaruhi kelakuan manusia dan dengan demikian akan berpengaruh pula terhadap apa yang diakibatkan oleh kelakuan tersebut. Misalnya, perubahan dari sistem nilai yang berorientasi “ feodalisme “ , menjadi sistem nilai yang berorientasi “ demokrasi “ sebagaimana tuntutan pada era reformasi sekarang ini, akan menimbulkan perubahan besar dalam kelakuan manusia atau tata kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan nilai-nilai budaya ini (nilai-nilai keluarga, sekolah dan masyarakat), maka kegiatan pendidikan perlu berpangkal dari satuan-satuan nilai budaya berbagai suku bangsa Indonesia yang terungkap dalam aneka warna kesusastraan, idea perilaku, upacara dan perayaan, dan ungkapan-ungkapan dalam kesusastraan lisan dan tertulis. Menurut Dimiyati (1990), ungkapan-ungkapan yang beracuan rasional dan simbolis tersebut sepatutnya dijadikan pangkal tolak pembudayaan nilai, perilaku ideal

yang dituntut dalam kehidupan modern. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Tilaar (2000) menekankan kembali pentingnya tradisi lisan di dalam pembentukan kepribadian anak didik.

Setelah mempelajari visi pembangunan nasional, misi pendidikan nasional dan pemikiran pakar-pakar pendidikan, maka dapat diidentifikasi beberapa “ *Core Values*” pendidikan di Indonesia. *Core Values* yang sangat strategis antara lain :

- (1) Wawasan Kebangsaan
- (2) Rasa tanggung-jawab warga negara (*civil responsibility*)
- (3) Sadar hukum dan lingkungan
- (4) Disiplin dan memiliki etik/moral yang tinggi
- (5) Mempunyai etos kerja yang tinggi
- (6) Budaya Produktivitas
- (7) Otonomi/Kemandirian
- (8) Solidaritas/gotong-royong

Menyangkut “ *core values* “ yang pertama (wawasan kebangsaan), sangat diperlukan untuk mengembangkan sikap peserta didik sebagai anggota dari kesatuan nasional (bangsa) .Ini sangat diperlukan untuk memelihara dan memperkuat identitas kebangsaan, sebagaimana dirumuskan dalam isu nomor 3 dalam bab I. Sementara itu, *core values* nomor 2 (rasa tanggung jawab warga negara) dan *core values* nomor 3 (sadar hukum dan lingkungan), dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik.

Core values nomor 4,5,6,dan 7 (disiplin,etos kerja,budaya produktivitas dan kemandirian), sangat diperlukan untuk merombak sikap mental (mentalitas) bangsa yang

menghambat pembangunan, yang selama ini sangat dirasakan pengaruhnya. Core values ini sangat diperlukan bagi suatu bangsa yang memasuki era industrialisasi dengan cirinya antara lain : (1) mementingkan produktivitas dan efisiensi, (2) memerlukan tipe manusia karya yang berdisiplin tinggi, mau bekerja keras, mementingkan mutu, menghargai waktu, berorientasi ke masa depan, memiliki kemandirian. Hal ini diperlukan untuk merespons isu pendidikan IPS nomor 1 dan 2 sebagaimana telah dirumuskan pada bab I.

Sementara itu, core values nomor 8 (solidaritas/gotong-royong) yang merupakan nilai tradisional, perlu dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat.

IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM IPS

Kurikulum Bermuatan Budaya Lokal

Kebijaksanaan tentang kurikulum yang sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat (budaya lokal), sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989, khususnya pasal 38 ayat 1 yang berbunyi “ pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan “ .

Kebijaksanaan yang berkaitan dengan kurikulum pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa bangsa kita memiliki keanekaragaman budaya, kondisi alam dan lingkungan sosialnya yang diharapkan dapat memperkaya kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, perlu diupayakan pelestariannya melalui pendidikan. Program pendidikan di sekolah harus memberikan wawasan pada siswa tentang apa yang khas dalam lingkungannya. Karena itu, muncul gagasan tentang “ *Ekologi Pendidikan* “ yang pusat

perhatiannya adalah hubungan antara pendidikan dan lingkungannya, dimana pendidikan merupakan suatu sub-sistem dalam suatu ekosistem tertentu. Ekologi pendidikan ini merupakan kesatuan beserta interelasinya yang meliputi pendidikan dan lingkungannya.

Secara umum kurikulum dengan nuansa budaya lokal ini bertujuan untuk membekali siswa agar mereka memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang keadaan lingkungan dan masyarakat, sehingga nantinya mampu mengembangkan serta melestarikan kebudayaan yang mendukung pembangunan.

Pada masa lalu, hal-hal tersebut di atas belum banyak diperhatikan. Tidak ada bedanya kurikulum untuk lingkungan perkotaan dengan lingkungan pedesaan. Pemuda yang berlebihan terhadap nilai-nilai kehidupan kota seperti yang dijumpai di berbagai sekolah yang ada di daerah pegunungan di pedesaan, bisa jadi merupakan salah satu faktor penyebab tingginya urbanisasi selama ini.

Tilaar (2000:204) , mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang konkrit adalah nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan lokal. Karena itu pula pengakuan terhadap kebudayaan lokal berarti pengakuan terhadap nilai-nilai yang mendasari tingkah laku manusia Indonesia. Dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan daerah, Tilaar menekankan perlunya perhatian terhadap kelestarian kebudayaan tradisi lisan yang ternyata mengandung nilai-nilai budaya luhur. Tradisi lisan ini perlu dimasukkan di dalam program pendidikan formal, maupun non-formal. Dalam tradisi lisan, terdapat pula aspek-aspek yang berkaitan dengan “*core values* “ yang akan dikembangkan. Tilaar (2000:196), memberikan contoh, misalnya lagu “ Srengengene “ di D.I Yogyakarta mempunyai nilai-nilai luhur untuk bekerja keras. Sudah barang tentu di setiap daerah pun memiliki nilai-nilai etos kerja, seperti misalnya di Bugis dengan ungkapan “ *lebibini mate*

madae naya mate temmarewe “ (lebih baik mati bermandi keringat daripada mati karena tidak makan), Jawa Timur, dengan ungkapan “ nyambut gawe sing ngetu cek e kabeh bareng maju “, Jawa Barat dengan ungkapan “ mun teu ngakal moal ngakeul “ dsb.

Kurikulum Pendidikan Nilai

Sistem nilai budaya merupakan inti dari setiap kebudayaan. Dalam bagian terdahulu sudah dijelaskan bagaimana nilai budaya ini mempengaruhi aspek kebudayaan lainnya. Delapan (8) nilai inti (*core values*) yang telah dibahas pada dasarnya merupakan sistem nilai budaya. Seperti kita ketahui, pendidikan IPS pun merupakan pendidikan yang sarat nilai. Karena itu tidak bisa mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai, termasuk di dalamnya nilai moral.

Salah satu aspek dari pendidikan nilai adalah nilai moral yang merupakan sarana pengatur kehidupan bersama. Menurut Tilaar (1999:74) pendidikan di seluruh dunia kini sedang mengkaji kembali perlunya pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter dibangkitkan kembali. Untuk Indonesia pendidikan budi pekerti ini sangat relevan sekali, sebab pada dasarnya krisis yang baru kita lalui pada dasarnya merupakan krisis moral. Karena itu tidak mengherankan belakangan ini muncul kembali gagasan untuk menerapkan pendidikan budi pekerti.

Pendidikan budi pekerti sesungguhnya memiliki pengertian yang sama dengan pendidikan moral atau pendidikan akhlak, yang sudah ada dalam kurikulum sejak dulu baik dalam bentuk mata pelajaran sendiri maupun diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Namun, kecenderungan yang terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat

adalah munculnya berbagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai/norma-norma yang berlaku.

Salah satu aspek yang sangat lemah dalam pendidikan nilai adalah “ sistem penyampaian “. Seperti yang diungkapkan Aziz Wahab (1999), yang seharusnya diajarkan adalah “ pendidikan nilai “ tetapi kenyataan yang diajarkan adalah “ tentang pendidikan nilai “. Ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Pendekatan pendidikan moral seperti penanaman nilai (*inculcation approach*), perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development*), analisis nilai (*values analysis approach*), klarifikasi nilai (*values clarification approach*), pembelajaran berbuat (*action learning approach*), dalam praktek pengajaran di kelas masih sangat jarang digunakan.

Dengan mempertimbangkan Pedoman Budi Pekerti yang telah dikembangkan oleh Pusbangkurrandik, Pendidikan Moral di Singapura dan Malaysia, Boediono dkk.(1999), telah mengusulkan materi pendidikan budi pekerti yang dikelompokkan dalam 4 ruang lingkup kajian yakni : Diri, Keluarga, Masyarakat dan Alam. Masing-masing lingkup memiliki nilai-nilai yang harus dikembangkan menjadi kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh setiap siswa. Sedangkan untuk melakukan penilaian, ditetapkan indikator untuk masing-masing kompetensi tersebut. Misalnya, dalam lingkup sekolah ada nilai yang harus dikembangkan menyangkut “ etos kerja “ dan “ disiplin “, maka yang menjadi kompetensinya adalah “ bekerja keras untuk meningkatkan prestasi “ dan tepat waktu dan tepat janji dalam mengerjakan pekerjaan sekolah “ .

Penjabaran nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam masing-masing lingkup (diri, keluarga, masyarakat dan alam), idealnya mengacu kepada “ core values “ pendidikan yang telah ditetapkan..

Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum IPS dan Kendala yang Dihadapinya

Perencanaan dan pengembangan suatu kurikulum, lazimnya mengikuti langkah-langkah : (1) identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di masyarakat yang bersumber pada berbagai unsur perubahan sosial kultural (*societal needs*); (2) atas dasar kebutuhan-kebutuhan sosial tersebut, kemudian dirumuskan tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah yang biasanya mencerminkan profil lulusan yang diinginkan; (3) menentukan sekelompok isi/materi yang perlu dipelajari subjek didik untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks IPS biasanya diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial ; (4) mengorganisasikan isi/materi ke dalam urutan-urutan bahan belajar dengan mengacu pada prinsip-prinsip psikologi. Langkah ke empat ini menghasilkan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) atau Silabi; (5) menyusun unsur-unsur penunjang kurikulum berupa pedoman teknis pelaksanaan kurikulum dan penulisan buku-buku teks yang relevan dengan kurikulum; (6) keseluruhan perangkat kurikulum di atas dikembangkan menjadi berbagai bentuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah dengan berbagai aspeknya. Pelaksanaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab guru.

Keenam langkah pengembangan kurikulum di atas, seharusnya merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam kenyataannya, sering terjadi kesenjangan antara “ *ideal curriculum* “ dengan “ *actual curriculum* “. Soedijarto (1991:146), menyatakan “ kelemahan yang sering terjadi dalam penyusunan kurikulum di Indonesia adalah bahwa tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan di tingkat pengembang kurikulum, ternyata menghasilkan lulusan yang tidak relevan dengan yang telah digariskan itu “.

Berkaitan dengan kelemahan tersebut, biasanya para guru di lapangan yang sering dituding tidak mampu melaksanakan pembaharuan kurikulum. Sekalipun telah dilakukan inservice training (penataran-penataran) dalam rangka pembaharuan kurikulum, tetapi setelah kembali dari inservice training, segala sesuatu kembali seperti semula, sehingga tidak ada perubahan (*nothing changed*). Mereka bekerja dengan “ target based “, mengejar penyelesaian materi sesuai target dalam kurikulum. Padahal yang diinginkan sebenarnya “ *outcome based* “, yang menuntut kreativitas dan improvisasi guru dalam pembelajaran untuk mencapai hasil (lulusan) yang berkualitas.

Karena itu perlu dicari upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut di atas. Masdjudi (1999), berdasarkan hasil penelitiannya merekomendasikan perlunya dibuat suatu model difusi/diseminasi untuk menyebarkan gagasan, visi dan misi pembaharuan yang terkandung dalam kurikulum. Pembaharuan pendidikan yang akan dikenalkan kepada para pelaksana (guru) harus teruji melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), kemudian disebarkan melalui interaksi sosial dalam wadah peningkatan profesional guru (MGMP), serta kegiatannya menekankan pemecahan masalah yang dihadapi dengan bantuan profesional yang tepat.

Demikian pentingnya peranan guru ini, sehingga ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya guru merupakan ujung tombak dari setiap pembaharuan pendidikan. Dalam era globalisasi ini, diperlukan strategi pembelajaran yang menekankan orientasi ke masa depan, serta strategi pembelajaran yang mampu mendorong pengembangan kemampuan menghadapi situasi ketidakpastian akibat perubahan yang cepat dan hasilnya tidak gampang diduga. Karena itu penting latihan berpikir kompleks dan *enigmatik* (penuh teka teki) dan latihan bertanya dan membuat keputusan dalam perpektif perubahan terus menerus. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting, sebab bila bersikap statis, apa yang dipelajari hari ini, mungkin akan kurang artinya bagi masa depan. Dalin dan Rust (1995), menyatakan “ *a person’s surroundings change so frequently and so radically within the span of a life time that yesterday’s learning is increasingly less use for the life time tomorrow* “. Pembaharuan ke arah ini hanya mungkin terjadi bila para pendidik (guru) mampu dan mau melakukannya

DATAR PUSTAKA

Boediono dkk.(1999). “*Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Budi Pekerti* “,Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.020 (Desember).

Denis Lawton (1991).*Education, Culture and the National Curriculum*, London : Hodder and Stoughton.

Dimiyati,Muhammad.(1988). *Landasan Kependidikan*, Jakarta : P2LPTK Depdikbud.

Dalin,Per & Rust, Van de.(1995). *Towards Schooling for the Twenty-first Century*, Melbourne : Cas Sell.

Koentjaraningrat. (1984).*Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia

Masdjudi (1999).” *Kesenjangan Antara Harapan Dan Kenyataan Dalam Pelaksanaan Kurikulum* “ Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.019 (Oktober).

Soedijarto (1991). *“Sebuah Pemikiran tentang Kurikulum yang Relevan untuk Menunjang Pembangunan Menuju Tinggal Landas”* dalam Conny Semiawan ed. *Mencari Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, Jakarta : PT Grasindo.

Somantri, Muh.Numan.(2000).*Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*,Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Tilaar,H.A.R. (1999). *Pendidikan,Kebudayaan dan Masyarakat Madani*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Tilaar,H.A.R.(2000).*Paradigma Baru Pendidikan Nasional*,Jakarta : Rineka Cipta.

Wahab,Azis (1999). *“ Kurikulum PPKn 1994 Isu dan Permasalahan Untuk Penyempurnaan “* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.018 (September)

